



Hic. 04.01/221

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 149 /M.PPN/04/2004
TENTANG
TIM PENYIAPAN TANGGAPAN PEMERINTAH
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL INISIATIF DPR-RI**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sesuai dengan hak inisiatifnya telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (RUU-SPPN) dan meminta tanggapan pemerintah melalui surat No. RU.02/1139/DPR-RI/2004 tertanggal 4 Maret 2004;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti permintaan DPR-RI tersebut, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN/Kepala Bappenas) telah ditunjuk sebagai Koordinator untuk mempersiapkan tanggapan pemerintah atas RUU-SPPN inisiatif DPR-RI;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Penyiapan Tanggapan Pemerintah atas RUU-SPPN Inisiatif DPR-RI yang ditetapkan dengan Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas;

d. bahwa

- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai Tim Penyusun Tanggapan Pemerintah atas RUU SPPN Inisiatif DPR-RI;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden RI No. 228/M/2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PENYIAPAN TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL INISIATIF DPR-RI.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyiapan Tanggapan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Inisiatif DPR-RI yang untuk selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- KEDUA : Tim mempunyai tugas :
- (a) menyiapkan, merumuskan, dan menyusun tanggapan pemerintah atas RUU SPPN Inisiatif DPR-RI;
 - (b) menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka pembahasan mengenai RUU SPPN Inisiatif DPR-RI;
 - (c) melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu tentang penyusunan tanggapan Pemerintah atas RUU SPPN Inisiatif DPR-RI;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas;
- KEEMPAT : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dapat ditunjuk narasumber dan konsultan yang kompeten, serta dibentuk Tim Materi dan Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pengarah;
- KELIMA : Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyiapan tanggapan pemerintah atas RUU SPPN inisiatif DPR dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 April 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Tembusan

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Sekretaris Kabinet;
2. Sdr. Menteri Keuangan;
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
4. Sdr. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Sdr. Menteri Pertahanan;
7. Sdr. Menteri Kesehatan;
8. Sdr. Menteri Pertanian;
9. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
10. Sdr. Menteri Perhubungan;
11. Sdr. Menteri Kehakiman dan HAM;
12. Sdr. Menteri Energi dan Mineral;
13. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 149/M.PPN/04/2004

TANGGAL : 7 April 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYIAPAN TANGGAPAN PEMERINTAH
ATAS RUU SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL INISIATIF DPR-RI

I. TIM PENGARAH

1. Dr. Ir. H. Koensatwanto Inpasihardjo Dip. HE, MSc Sebagai Ketua
Sekretaris Meneg PPN/Sekretaris Utama
Bappenas
2. Ir. Max H. Pohan, CES, MA Sebagai Sekretaris
Staf Ahli Meneg PPN Bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Keadilan Sosial
3. Dr. Soekarno Wirokartono Sebagai Anggota
Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas
4. Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA Sebagai Anggota
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Bappenas
5. Ir. Tatag Wiranto, MURP Sebagai Anggota
Deputi Bidang Otonomi Daerah dan
Pengembangan Regional, Bappenas
6. I Dewa Putu Rai, SIP Sebagai Anggota
Deputi Bidang Politik, Keamanan dan
Pertahanan, Bappenas
7. Dra. Leila Retna Komala, MA Sebagai Anggota
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan, Bappenas
8. Ir. Suyono Dikun, MSc, Ph.D, IPM Sebagai Anggota
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Bappenas

9. Dr

- | | |
|--|---------------------|
| 9. Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Bappenas | Sebagai Anggota |
| 10. Dr. Ir. Son Diamar, MSc
Staf Ahli Meneg PPN Bidang
Maritim dan Tata Ruang | Sebagai Anggota |
| 11. Dr. Mulia P. Nasution, Dess
Kepala Badan Akuntansi dan Keuangan
Negara, Departemen Keuangan | Sebagai Anggota |
| 12. Seman Widjojo
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Departemen Dalam Negeri | Sebagai Anggota |
| 13. Drs. Baedhowi
Sekretaris Jenderal
Departemen Pendidikan Nasional | Sebagai Anggota |
| 14. Dr. Mas Widjaja
Direktur Jenderal Perencanaan Sistem
Pertahanan, Departemen Pertahanan | Sebagai Anggota |
| 15. Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, MSc
Staf Ahli Menteri Kimpraswil Bidang Otonomi
dan Keterpaduan Pembangunan Daerah | Sebagai Anggota |
| 16. Lambock V. Nahattands, SH, LLM
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-
undangan, Sekretariat Kabinet | Sebagai Anggota |
| II. TIM PELAKSANA | |
| 1. Ir. Max H. Pohan, CES, MA
Staf Ahli Meneg PPN Bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Keadilan Sosial | Sebagai Ketua |
| 2. Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA
Direktur Keuangan Negara dan
Analisa Moneter, Bappenas | Sebagai Wakil Ketua |

3. Ir. Dida Heryadi Salya, MA
Kepala Biro Perencanaan, Organisasi
dan Tata Laksana, Bappenas
Sebagai Sekretaris
4. Ir. Agus Rahardjo, MSM
Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan
Pembangunan, Bappenas
Sebagai Anggota
5. Diani Sadia Wati, SH, LLM
Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Bappenas
Sebagai Anggota
6. Dr. Slamet Seno Adji, MA
Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan
Pembangunan, Bappenas
Sebagai Anggota
7. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA
Kepala Biro Humas, Persidangan dan
Administrasi Pimpinan, Bappenas
Sebagai Anggota
8. Dr. Maurin Sitorus, SH
Kepala Biro Hukum dan Humas
Departemen Keuangan
Sebagai Anggota
9. Drs. Parluhutan Hutahaean, MA
Kepala Pusat Analisa Belanja Negara,
Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan
Sebagai Anggota
10. Drs. Fazli Siregar, MPIA
Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Departemen Dalam Negeri
Sebagai Anggota
11. Brigjen TNI Sugeng Widodo, SH, MSi, MH
Kepala Biro Hukum,
Departemen Pertahanan
Sebagai Anggota
12. Drs. Sutjipto
Kepala Biro Perencanaan,
Departemen Pendidikan Nasional
Sebagai Anggota
13. Dr. Gunawan Setiadi, MPH
Kepala Biro Perencanaan,
Departemen Kesehatan
Sebagai Anggota

14. Dr

- | | |
|--|-----------------|
| 14. Dr. Faiq Bahfen, SH
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Kesehatan | Sebagai Anggota |
| 15. Tjindra Parma Wignyoparayitno, SH, MH
Kepala Biro Hukum, Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah | Sebagai Anggota |
| 16. Drs. Robby Kumenaung
Kepala Biro Perencanaan,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan | Sebagai Anggota |
| 17. Sutisna Prawira SH
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral | Sebagai Anggota |
| 18. Dewi Cipto, SH
Sesditjen Peraturan Perundang-undangan,
Departemen Kehakiman dan HAM | Sebagai Anggota |
| 19. Ir. Dedi Darmawan
Kepala Biro Perencanaan,
Departemen Perhubungan | Sebagai Anggota |
| 20. Ir. Hari Priyono, MSi
Kepala Biro Hukum dan Humas
Departemen Pertanian | Sebagai Anggota |
| 21. Drs. Li Baihaqi Mustafa
Kepala Biro Perencanaan, BPKP | Sebagai Anggota |

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWIK KIAN GIE